

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman pada pajak restoran di Bapenda Kabupaten Tegal telah mencakup tahapan yang cukup sistematis, meliputi pendaftaran dan pendataan, perhitungan, pelaporan, pembayaran, hingga penagihan pajak. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

Kendala utama yang dihadapi Bapenda Kabupaten Tegal dalam pemungutan pajak restoran meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya pengawasan, sistem yang belum terintegrasi secara digital, serta proses penagihan pajak masih terlalu lambat karena terlalu banyak tahapan administrasi dan tidak cukup fleksibel atau cepat untuk menindak Wajib Pajak yang menunggak. Selain itu, sosialisasi yang kurang dan lemahnya penegakan sanksi juga turut mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak.

Walaupun demikian, Bapenda telah melakukan sejumlah upaya seperti peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, perencanaan penggunaan teknologi informasi perpajakan, serta penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi untuk mengatasi kendala tersebut.

4.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan efektivitas pemungutan PBJT makanan dan minuman atas Restoran sebagai berikut:

- 1) Bapenda perlu mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara prosedur pemungutan pajak restoran melalui *online* ataupun *offline*.

- 2) Penerapan teknologi seperti *e-tax* dan *tapping box* perlu segera dipercepat agar pelaporan lebih akurat.
- 3) Bapenda bisa menambah jumlah petugas pengawasan dan melakukan audit berkala terhadap restoran yang berpotensi dan belum melaporkan omzet secara benar.
- 4) Perlu ditingkatkan kerja sama lintas sektor, seperti dengan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, dan dinas lainnya untuk memastikan semua usaha restoran terdaftar sebagai WP aktif.